



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KSDAE

2025



DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Sumber Daya Manusia	3
D. Barang Milik Negara	6
E. Keuangan	8
F. Isu-Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Rencana Kerja	12
C. Perjanjian Kinerja	14
D. Perjalanan Anggaran	14
E. Pohon Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja 2025	17
B. Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran	34
C. Dukungan terhadap Prioritas Nasional	36
D. Capaian Program Tematik	36
E. Realisasi Anggaran	42
BAB IV PENUTUP	43
A. Simpulan Umum Capaian Kinerja	43
B. Permasalahan & Langkah ke Depan	43
LAMPIRAN	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi IKK Setditjen KSDAE 2025	v
Tabel 2. Rencana Aksi Setditjen KSDAE Tahun 2025.....	13
Tabel 3. Analisis Capaian terhadap Target Tahunan Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE	18
Tabel 4. Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra) Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE	18
Tabel 5. Analisis Capaian terhadap Target Tahun-Tahun Sebelumnya Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE	19
Tabel 6. Benchmarking Kinerja Nilai SAKIP lingkup	20
Tabel 7. Analisis Efisiensi Anggaran Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	21
Tabel 8. Analisis Capaian terhadap Target Tahunan Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal KSDAE.....	23
Tabel 9. Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal KSDAE.....	24
Tabel 10. Analisis Capaian terhadap Target Tahun-Tahun Sebelumnya Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal KSDAE.....	24
Tabel 11. Benchmarking Kinerja Nilai SPIP lingkup Kementerian Kehutanan	25
Tabel 12. Analisis Efisiensi Anggaran Nilai SPIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	26
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Setditjen KSDAE tahun 2025	26
Tabel 14. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	28
Tabel 15. Hasil penilaian E-SAKIP Setditjen KSDAE 2025.....	31
Tabel 16. Nilai Indeks Profesionalitas ASN lingkup	33
Tabel 17. Target dan Capaian Indikator Kinerja Setditjen KSDAE 2025.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pejabat Struktural Setditjen KSDAE.....	4
Gambar 2. Sebaran Pegawai Setditjen KSDAE per Jenis Kelamin	5
Gambar 3. Sebaran Pegawai Setditjen KSDAE per Bagian	5
Gambar 4. Komposisi Jabatan Setditjen KSDAE.....	5
Gambar 5. Sebaran Pegawai Setditjen KSDAE Berdasarkan Status	6
Gambar 6. Sebaran Pegawai Setditjen KSDAE Berdasarkan Pendidikan	6
Gambar 7. Persebaran Nilai Perolehan BMN Intrakomptabel Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE	8
Gambar 8. Tren Pagu dan Realisasi Setditjen KSDAE 2021-2025.....	8
Gambar 9. Isu Strategis Bagian PEHKT Setditjen KSDAE	9
Gambar 10. Isu Strategis Bagian KSDMOTL Setditjen KSDAE.....	9
Gambar 11. Isu Strategis Sub Bagian Tata Usaha Setditjen KSDAE.....	10
Gambar 12. Tren Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE	19
Gambar 13. Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Ditjen KSDAE oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan.....	23
Gambar 14. Tren Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal KSDAE.....	25
Gambar 15. IKM per Unsur Layanan	27
Gambar 16. Penilaian Maturitas Setditjen KSDAE 2025 pada.....	28
Gambar 17. evaluasi atas Penilaian Maturitas SPIP.....	30
Gambar 18. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran	35
Gambar 19. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Kantor Pusat.....	35
Gambar 20. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Pusat	35
Gambar 21. Nilai Kinerja Anggara Kantor Pusat Ditjen KSDAE 2025.....	36
Gambar 22. Capaian PN 2 Ditjen KSDAE 2025	36
Gambar 23. Koordinasi Bersama Tim Inspektorat Wilayah, PMU dan UKPBJ40	
Gambar 24. Bimbingan Teknis Mengundang Perwakilan Level 2	41
Gambar 25. Monitoring PE di TN Gunung Gede Pangrango	41
Gambar 26. Monitoring Bioprospeksi di TN Gunung Merapi.....	41
Gambar 27. Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Setditjen KSDAE 2021-2025.....	42

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Setditjen KSDAE) Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dalam mendukung

pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Penyusunan laporan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat ikhtisar capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE sepanjang Tahun 2025, termasuk realisasi program, kegiatan, serta penggunaan anggaran dalam rangka memberikan dukungan administrasi, koordinasi, dan pembinaan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Melalui laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa mendatang, sekaligus sebagai sarana transparansi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Jakarta, 19 Januari 2026
Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nandang Prihadi'.

Dr. Ir. Nandang Prihadi, S.Hut, M.Sc.
NIP. 19691204 199503 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2025 mencerminkan komitmen dalam mendukung sasaran strategis Ditjen KSDAE, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang akuntabel, responsif, dan berpelayanan prima. Laporan ini disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan regulasi terkait, dengan fokus pada dukungan administrasi, koordinasi, dan pembinaan unit organisasi di lingkungan Ditjen KSDAE.

A. Ringkasan capaian kinerja: sasaran strategis, indikator, target, realisasi, dan persentase realisasi.

Capaian kinerja tahun 2025 Setditjen KSDAE diukur melalui IKK yang selaras dengan Renstra Ditjen KSDAE 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi IKK Setditjen KSDAE 2025

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase
Meningkatnya penguatan pengawasan internal dan kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen KSDAE	82,31 Poin	82,45 Poin	100,17 %
	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	3,8 Poin	3,9 Poin	102,63 %

B. Ringkasan kendala & langkah ke depan

Kendala dan langkah-langkah perbaikan dalam pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE 2025 sebagai berikut:

1. Kendala yang dihadapi:

- a) Koordinasi Setditjen KSDAE dengan Satker : masih ada tantangan sinkronisasi capaian kinerja yang belum sesuai dalam pencapaian Indikator kinerja SAKIP dan SPIP.
- b) SDM dan kapasitas Setditjen KSDAE yang masih kurang dalam pemahaman dalam pencapaian Kinerja Indikator Kinerja SAKIP dan SPIP.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Setditjen KSDAE) merupakan unit pendukung utama dalam lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Setditjen KSDAE bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen KSDAE, termasuk perencanaan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, hukum, serta kerjasama teknis.

Laporan Kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2025 disusun sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini mencerminkan pencapaian kinerja selama tahun 2025, sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk mendukung Rencana Strategis (Renstra) Ditjen KSDAE Tahun 2025-2029 yang bertema “Mengelola Keanekaragaman Hayati: Mengurangi Ancaman Kepunahan dan Mengoptimalkan Pemanfaatan untuk Produktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.” Renstra ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan misi Kementerian Kehutanan dalam menjadikan kawasan hutan sebagai entitas yang mengalirkan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial.

Di tengah transisi organisasi pasca pembentukan Kementerian Kehutanan yang terpisah dari Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024, Setditjen KSDAE berperan strategis dalam memastikan kelancaran dukungan administrasi untuk pencapaian target konservasi nasional, termasuk pengelolaan kawasan konservasi seluas lebih dari 27 juta hektare dan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia sebagai salah satu negara *megabiodiversity* terbesar di dunia.

Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE adalah pelaksana Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2025-2029 yang bertanggung jawab melaksanakan program dukungan manajemen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang akuntabel, responsif, dan berpelayanan prima. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Direktorat Jenderal KSDAE lainnya dengan capaian yang didasarkan pada pengukuran kinerja. Adapun indikator pengukuran

kinerja, yaitu: Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) pada Direktorat Jenderal KSDAE dan Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

B. Struktur Organisasi

Organisasi dan tata kerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan. Berdasarkan peraturan tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen KSDAE. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
2. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan sistem informasi, data dan informasi, dan hubungan masyarakat di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
3. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
4. Penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, telaahan peraturan perundang-undangan, administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan/atau luar negeri, dan pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan
5. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat jenderal.

Untuk melaksanakan tugas fungsi sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat Jenderal KSDAE terdiri atas:

1. Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik yang terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengelolaan data dan informasi, dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan dan telaahan peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya, administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan/atau luar negeri, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, serta penyusunan bahan dan koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat jenderal;

2. Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana yang terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, dan urusan pengelolaan barang milik negara;
3. Subbagian Tata Usaha yang terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern sekretariat direktorat jenderal.

C. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai lingkup Sekretaris Ditjen KSDAE sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia, dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan 31 Desember 2025 Sekretariat Ditjen KSDAE memiliki pegawai sebanyak 127 orang dengan rincian 9 orang CPNS, 80 orang PNS, 28 PPPK dan 10 orang PPPK Paruh waktu. Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE menjalankan fungsi koordinasi administratif dan teknis melalui sinergi empat pejabat struktural.

PEJABAT STRUKTURAL SETDITJEN KSDAE



Dr.Ir. Nandang Prihadi, S.Hut., M.Sc.
Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE



Hastoto Alifian, S.Hut., M.Si.
Kepala Bagian Program Evaluasi
Hukum dan Kerja Sama Teknik



Dian Banjar Agung, S.Hut., M.Sc.
Kepala Bagian Keuangan, Sumber Daya
Manusia, Organisasi dan Tata Laksana

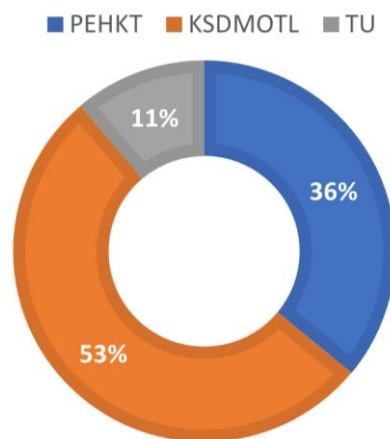


Lukman Hery Prasetyo, S.Hut., M.Eng.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

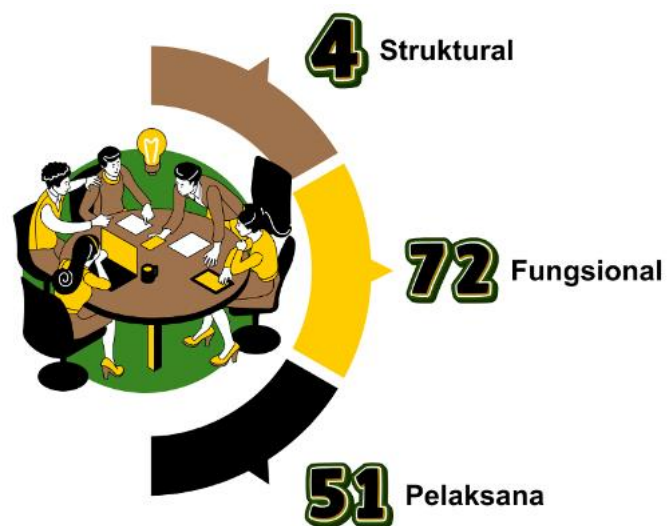
Gambar 1. Pejabat Struktural Setditjen KSDAE



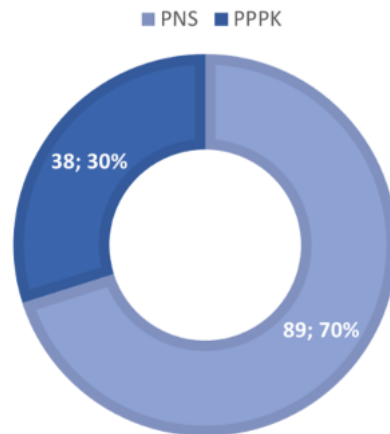
Gambar 2. Sebaran Pegawai Setditjen KSDAE per Jenis Kelamin



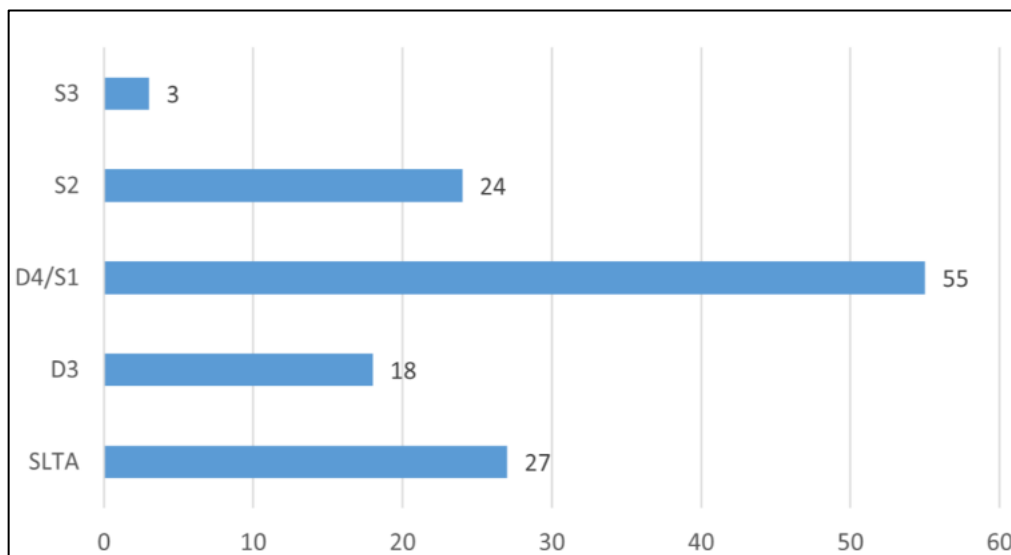
Gambar 3. Sebaran Pegawai Setditjen KSDAE per Bagian



Gambar 4. Komposisi Jabatan Setditjen KSDAE



Gambar 5. Sebaran Pegawai Setditjen KSDAE Berdasarkan Status



Gambar 6. Sebaran Pegawai Setditjen KSDAE Berdasarkan Pendidikan

D. Barang Milik Negara

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE secara bertahap melakukan penambahan sarana dan prasarana. Barang Milik Negara (BMN) yang tercatat pada neraca (BMN intrakomptabel) yang dikelola Setditjen KSDAE per 31 Desember 2025 memiliki nilai perolehan Rp. 81.589.740.926,-.

1. Persediaan

Nilai persediaan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 259.726.452,-, dengan rincian:

- a. Barang Konsumsi Rp. 204.617.717,-.

- b. Amunisi Rp. 4.602.000,-.
- c. Bahan untuk Pemeliharaan Rp. 49.930.000,-.
- d. Persediaan Lainnya Rp. 576.735,-.

2. Aset Tetap

Nilai aset tetap Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 80.865.115.974,-, dengan rincian:

- a. Tanah senilai Rp. 44.032.975.000,- sejumlah 1 bidang dengan luas 3.896 m².
- b. Peralatan dan Mesin senilai Rp. 18.651.282.812,- sejumlah 1.042 unit.
- c. Gedung dan Bangunan senilai Rp. 18.157.619.162,- sejumlah 1 unit.
- d. Aset Tetap Lainnya senilai Rp. 23.239.000,- sejumlah 221 unit

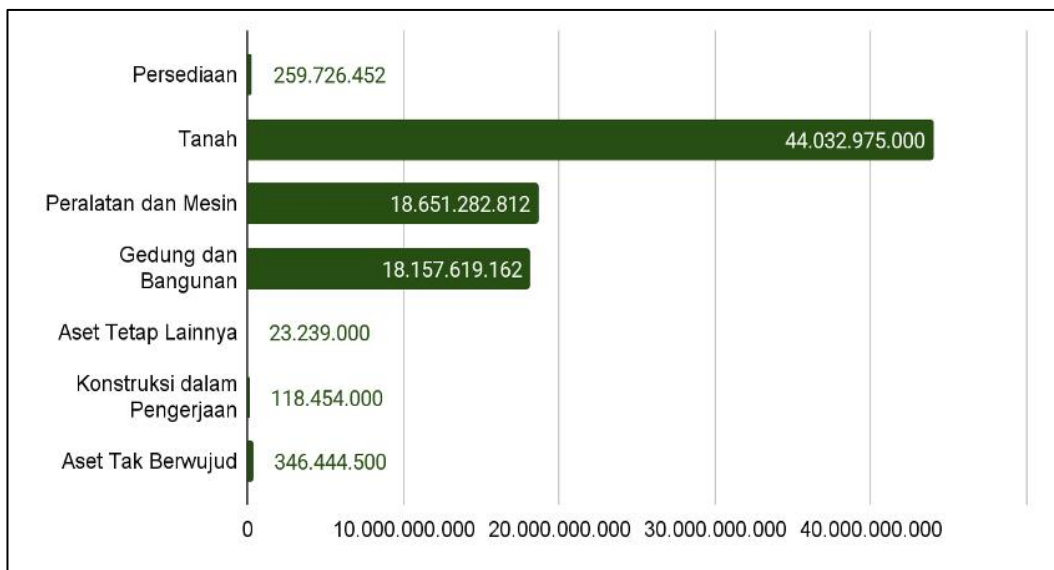
3. Konstruksi dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 118.454.000,- sejumlah 1 unit

4. Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud berupa *Software* pada Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 346.444.500,- sejumlah 9 unit.

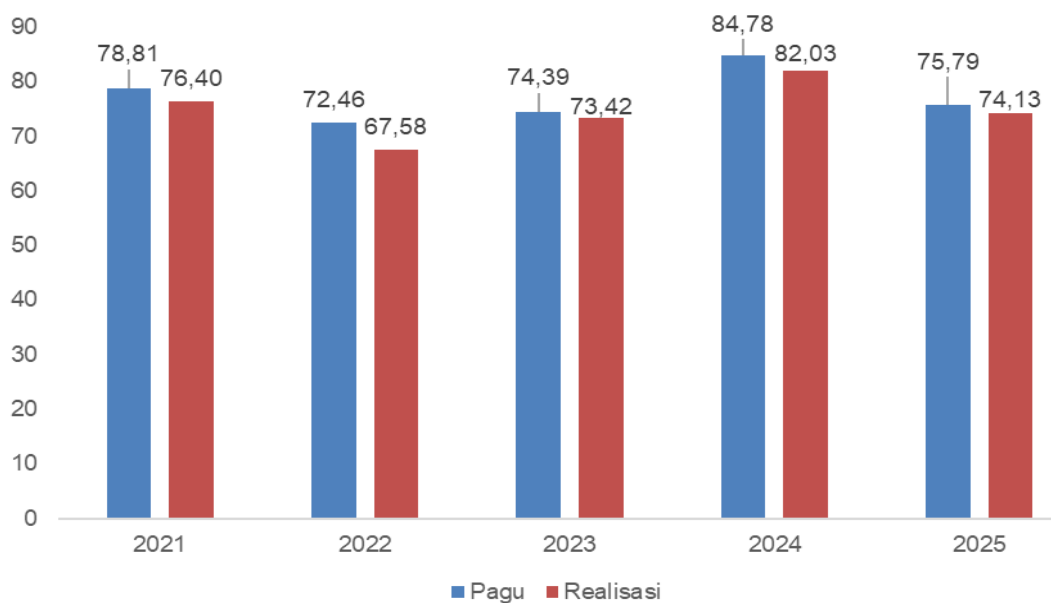
Sedangkan BMN yang tidak tercatat pada neraca karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi (BMN ekstrakomptabel) per 31 Desember 2025 senilai Rp. 128.599.000,- atas 210 unit Peralatan dan Mesin.



Gambar 7. Persebaran Nilai Perolehan BMN Intrakomptabel Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE

E. Keuangan

Tren Pagu Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE selama 5 tahun dari tahun 2021 sampai tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan realisasi anggaran. Dari data sebagaimana gambar di bawah, terlihat bahwa anggaran terbesar yang pernah dikelola oleh Setditjen KSDAE terdapat pada tahun 2024 dengan pagu sebesar Rp. 84,78 Miliar. Sedangkan pagu paling kecil berada pada tahun 2022 sebesar Rp.72,48 Miliar.



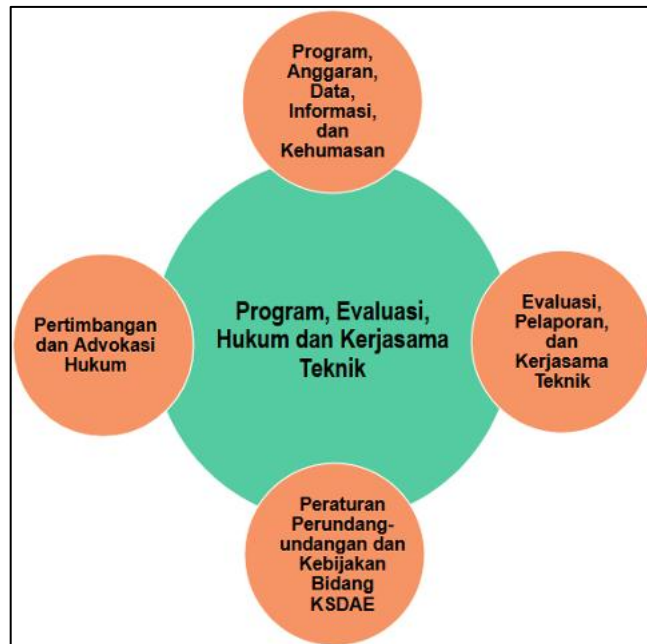
Gambar 8. Tren Pagu dan Realisasi Setditjen KSDAE 2021-2025

F. Isu-Isu Strategis

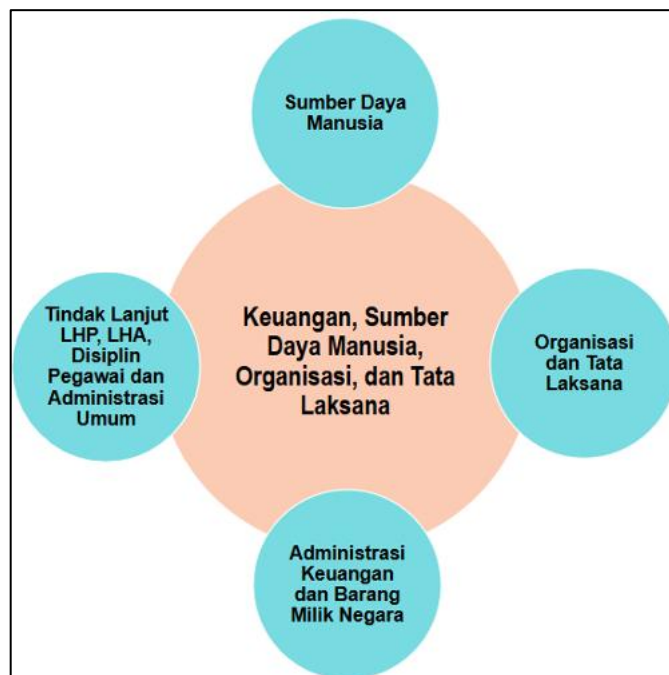
Isu utama dalam upaya pencapaian tujuan konservasi keanekaragaman hayati serta sasaran dan indikator kinerja program Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE diuraikan sebagai berikut:

1. Program, Anggaran, Data, Informasi, dan Kehumasan;
2. Evaluasi, Pelaporan, dan Kerjasama Teknik;
3. Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
4. Pertimbangan dan Advokasi Hukum;
5. Sumber Daya Manusia;
6. Organisasi dan Tata Laksana;
7. Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara;

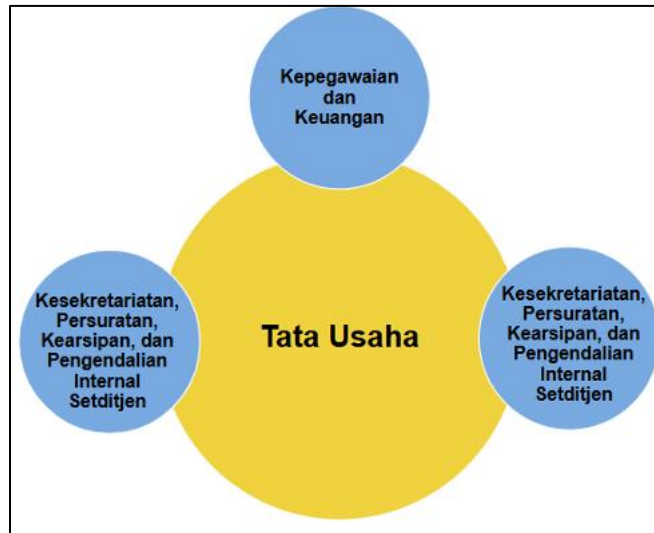
8. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Audit, Disiplin Pegawai dan Administrasi Umum;
9. Kepegawaian dan Keuangan;
10. Kesekretariatan, Persuratan, Kearsipan, dan Pengendalian Internal Setditjen;
11. Kerumahtanggaan dan Administrasi Barang Milik Negara.



Gambar 9. Isu Strategis Bagian PEHKT Setditjen KSDAE



Gambar 10. Isu Strategis Bagian KSDMOTL Setditjen KSDAE



Gambar 11. Isu Strategis Sub Bagian Tata Usaha Setditjen KSDAE



@BBKSDA NTT

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE telah disahkan melalui Keputusan Direktorat Jenderal KSDAE Nomor 200 Tahun 2025. Keputusan tersebut menjadi pedoman Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Teknis, dan UPT dalam penyusunan rencana strategis 2025-2029. Pada rencana strategis 2025 - 2029, Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai 2 (dua) sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Sasaran ini merupakan tujuan dari seluruh aktivitas dukungan manajemen pada Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE yaitu:

1. Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
2. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

Untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas, kinerja ini diukur dengan nilai maturitas SPIP setiap tahunnya. Untuk memastikan kinerja tersebut dapat tercapai, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE melakukan upaya pemantauan dan evaluasi kinerja yang transparan dan akuntabel, pengendalian terhadap proses bisnis, identifikasi dan mitigasi risiko, dan upaya lain yang berdampak baik terhadap organisasi.

Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien, diukur dengan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). SAKIP dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai SAKIP didasarkan pada evaluasi komprehensif terhadap empat komponen utama: Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Internal. Upaya Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dalam mencapai kinerja tersebut melalui penguatan pada bidang perencanaan dan evaluasi sehingga kualitas terhadap dokumen yang diperlukan dalam penilaian seperti perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan rencana kerja menjadi lebih baik.

Penyusunan rencana strategis 2025-2029 Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE sampai dalam tahap finalisasi. Penyusunan ini telah melalui proses panjang seperti koordinasi bersama pihak eksternal

seperti Inspektorat dan Biro Perencanaan dan melakukan konsolidasi internal lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE. Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman seluruh pegawai dalam meningkatkan kinerja periode 2025-2029.

Dalam rangka mendukung capaian kinerja pembangunan nasional yang salah satunya termaktub dalam dokumen Rencana Strategis dan sejalan dengan komitmen Indonesia dalam *Paris Agreement* serta *Nationally Determined Contribution (NDC)* untuk mencapai *net sink* pada sektor *Forestry and Other Land Use (FOLU)* pada tahun 2030, Ditjen KSDAE ditetapkan sebagai salah satu *Implementing Partner* berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan *Implementing Partner* Periode Kesatu FOLU Net Sink 2030 melalui sumber dana kerja sama Indonesia - Norwegia tahap kedua dan ketiga yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Ditjen KSDAE mendapatkan total alokasi dana Proyek FOLU NC 2 & 3 *Batch 1* sejumlah Rp. 173.100.000.000,- untuk periode 3 tahun (2025 s.d 2027) dengan alokasi dana tahun 2025 sejumlah Rp. 74.913.402.275,-.

Alokasi dana tersebut dimandatkan secara spesifik untuk mendukung upaya pengendalian perubahan iklim pada Bidang III: Konservasi Keanekaragaman Hayati, yang memiliki peran bahwa ekosistem alami sebagai carbon sinks dan penyedia jasa ekosistem dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Proyek ini dirancang untuk mencapai 5 (lima) output strategis yang saling terintegrasi dan berkontribusi pada pencapaian target NDC Indonesia. yaitu : C.1. Konservasi ekosistem dan peningkatan populasi spesies, C.2. Perlindungan Hutan/Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi dan Restorasi Habitat yang terfragmentasi, C.3. Pengelolaan Jasa Ekosistem dan Taman Hutan Raya, C.4. Keragaman Spesies dan Genetik dieksplorasi dan dikomersialkan untuk masyarakat, dan C.5. Dukungan Manajemen dan Operasional. Selanjutnya 5 output tersebut diturunkan ke dalam 6 kegiatan utama, dan 24 kegiatan berikut indikatornya.

B. Rencana Kerja

Rencana Kerja (Renja) Setditjen KSDAE Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari Renstra 2025-2029. Renja ini memuat program dukungan manajemen, kegiatan pokok, dan target kinerja tahunan yang mendukung Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Program Utama:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE.
2. Kegiatan meliputi pengawasan internal, reformasi birokrasi, layanan internal, pengendalian proses, penguatan SDM, dan pengelolaan keuangan/BMN.

Sasaran Program Tahun 2025:

1. Meningkatnya penguatan pengawasan internal dan kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen KSDAE.
2. Pengendalian dan Pengawasan Internal Setditjen KSDAE yang Agile, Efektif dan Efisien.
3. Pengendalian dan Pengawasan Internal Setditjen KSDAE yang Agile, Efektif dan Efisien.
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja Setditjen KSDAE.
5. Penguatan organisasi dan Sumber Daya Manusia Ditjen KSDAE.
6. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen KSDAE yang efektif, efisien dan akuntabel.

Rencana Kerja Tahun 2025 Setditjen KSDAE difokuskan pada prioritas nasional, dengan rencana aksi triwulanan sebagai berikut (berdasarkan perspektif *Balanced Scorecard* sebagai berikut:

Tabel 2. Rencana Aksi Setditjen KSDAE Tahun 2025

Perspektif	No	Sasaran dan Indikator	Q1	Q2	Q3	Q4	Target Tahunan
Stakeholder	1	Meningkatnya penguatan pengawasan internal dan kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen KSDAE					
	1.1	Nilai Maturitas SPIP Ditjen KSDAE	25%	50%	75%	100%	3,8 poin
	1.2	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	25%	50%	75%	100%	82,31 poin
Customer	2	Meningkatnya kualitas layanan internal yang berorientasi kepuasan					
	2.1	Nilai Survey Kepuasan Layanan	25%	50%	75%	100%	79 poin
Internal Process	3	Pengendalian dan Pengawasan Internal Setditjen KSDAE yang Agile, Efektif dan Efisien					
	3.1	Nilai Maturitas SPIP Setditjen KSDAE	25%	50%	75%	100%	3,9 poin
	4	Peningkatan akuntabilitas kinerja Setditjen KSDAE					
	4.1	Nilai SAKIP Setditjen KSDAE	25%	50%	75%	100%	89 poin
Learning & Growth	5	Penguatan organisasi dan Sumber Daya Manusia Ditjen KSDAE					

Perspektif	No	Sasaran dan Indikator	Q1	Q2	Q3	Q4	Target Tahunan
	5.1	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan	25%	50%	75%	100%	83 poin
	6	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen KSDAE yang efektif, efisien dan akuntabel					
	6.1	Laporan keuangan yang akuntabel	25%	50%	75%	100%	1 dokumen

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE (Dr. Ir. Ammy Nurwati, M.M, NIP. 19690821 199403 2 001) sebagai Pihak Pertama dan Direktur Jenderal KSDAE (Prof. Dr. Satyawati Pudyatmoko, S.Hut., M.Agr.Sc., NIP. 19710809 199512 1 001) sebagai Pihak Kedua. Perjanjian ini ditandatangani di Jakarta pada Desember 2025, dengan komitmen untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi *outcome*. Target Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Setditjen KSDAE 2025 sebagai berikut:

1. Nilai Maturitas SPIP Ditjen KSDAE: 3,8 poin.
2. Nilai SAKIP Ditjen KSDAE: 82,31 poin.
3. Nilai Survey Kepuasan Layanan: 79 poin.
4. Nilai Maturitas SPIP Setditjen KSDAE: 3,9 poin.
5. Nilai SAKIP Setditjen KSDAE: 89 poin.
6. Indeks Profesionalitas ASN: 83 poin.
7. Laporan keuangan akuntabel: 1 dokumen.

Pihak Pertama bertanggung jawab atas pencapaian target melalui pengawasan berjenjang, sementara Pihak Kedua memberikan supervisi, evaluasi, serta penghargaan/sanksi. Tidak terdapat perubahan pada Perjanjian Kinerja 2025.

D. Perjalanan Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE, telah dialokasikan anggaran untuk tahun anggaran 2024 yang digunakan untuk pemenuhan belanja operasional dan non operasional. Anggaran belanja operasional digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan layanan perkantoran yang meliputi belanja pegawai dan operasional perkantoran sedangkan belanja non operasional digunakan untuk membiayai kegiatan teknis yang bersifat prioritas nasional dan kegiatan lainnya sesuai dengan Rencana Kerja Sekretariat Ditjen KSDAE.

Pagu anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2025 adalah Rp. 62.594.940.000,-, yang dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE. Anggaran ini merupakan bagian dari pagu keseluruhan Ditjen KSDAE Tahun 2025 sebesar 1,6 Triliun, dengan fokus pada efisiensi, dan akuntabilitas, dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini.

Pada tahun 2025 pagu anggaran pada Kantor Pusat khususnya Sekretariat Ditjen KSDAE mengalami 20 kali revisi anggaran (7 revisi POK, 5 Kantor Wilayah dan 8 di DJA), sehingga pada akhir tahun 2025 pagu anggaran Sekretariat Ditjen KSDAE adalah sebesar Rp. 75.795.629.000,-.

E. Pohon Kinerja

Pohon kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2025 menggambarkan hierarki pencapaian dari visi-misi hingga indikator kegiatan, berdasarkan perspektif *Balanced Scorecard (Stakeholder, Customer, Internal Process, Learning & Growth)*.

1. Struktur Pohon Kinerja:
2. Visi: Pengelolaan keanekaragaman hayati yang seimbang dengan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial.
3. Misi: 6 misi utama:
 - a. Meningkatkan penguatan pengawasan internal dan kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien.
 - b. Meningkatkan kualitas layanan internal yang berorientasi pada kepuasan.
 - c. Mewujudkan pengendalian dan pengawasan internal yang *agile*, efektif, dan efisien.
 - d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja.
 - e. Penguatan organisasi dan sumber daya manusia.
 - f. Penguatan pengelolaan keuangan dan barang milik negara (BMN) yang efektif, efisien, dan akuntabel.
4. Tujuan Strategis: Mendukung tujuan Ditjen KSDAE dalam pengelolaan konservasi berkelanjutan.
5. Sasaran Program:
 - a. Meningkatnya penguatan pengawasan internal dan reformasi birokrasi (*Stakeholder*).
 - b. Meningkatnya kualitas layanan internal (*Customer*).
 - c. Pengendalian internal yang *agile* dan peningkatan akuntabilitas (*Internal Process*).

- d. Penguatan organisasi, SDM, keuangan, dan BMN (*Learning & Growth*).
 - e. Indikator Kinerja Program (IKP): Nilai SPIP, SAKIP, *survey* kepuasan, indeks profesionalitas ASN, dan laporan keuangan.
6. Sasaran Kegiatan & Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Target triwulanan seperti dalam Rencana Aksi, dengan pemantauan berkala untuk memastikan *cascading* ke unit pelaksana.

Pohon kinerja ini memastikan *alignment* dengan target nasional dan Ditjen KSDAE, dengan evaluasi berkala sepanjang tahun 2025.



@BBKSDA NTT

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja 2025

1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan instansi pemerintah. Pelaksanaan SAKIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2025 sebesar 89,43 yang diampu sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Setditjen KSDAE merefleksikan capaian akuntabilitas kinerja yang sangat baik. Sebagai IKK, nilai ini bukan hanya angka evaluasi, tetapi menjadi tolok ukur keberhasilan Setditjen KSDAE dalam memastikan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan berorientasi hasil.

Capaian tersebut sejalan dengan regulasi utama seperti Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014, serta PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa setiap unit kerja wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja berbasis *outcome*. Dengan nilai 89,43, Setditjen KSDAE menunjukkan bahwa indikator kinerja yang diampu telah memenuhi standar tinggi dalam tata kelola birokrasi, mendukung agenda Reformasi Birokrasi, dan memperkuat legitimasi publik terhadap pengelolaan konservasi sumber daya alam.

Narasi pendukung capaian ini juga tampak dari keberhasilan KSDAE dalam mengintegrasikan sistem informasi kinerja digital, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, serta mengoptimalkan anggaran untuk program prioritas seperti rehabilitasi hutan dan pengendalian kebakaran hutan/lahan. Dengan demikian, nilai SAKIP yang tinggi sebagai IKK Setditjen KSDAE menjadi bukti nyata komitmen terhadap akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan.

Tabel 3. Analisis Capaian terhadap Target Tahunan Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	%
Meningkatnya Penguatan Pengawasan Internal dan Kualitas Reformasi Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Efisien di Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	82,31 Poin	82,45 Poin	100,17%

Analisis pembahasan capaian dengan target tahunan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2025 mencapai 82,45 poin. Target tahunan 2025 \geq 82,31 poin. Persentase pencapaian: 100,17% (melebihi target). Peningkatan ini dicapai melalui penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, penguatan *monitoring*-evaluasi internal, serta pemanfaatan aplikasi digital berbasis e-SAKIP Kementerian Kehutanan.

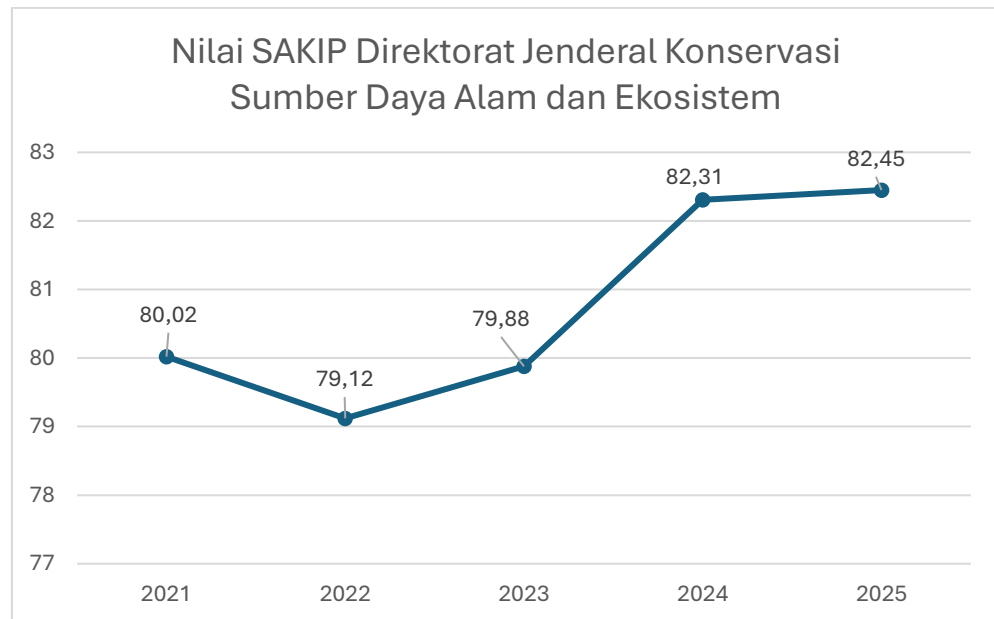
Tabel 4. Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra) Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
Meningkatnya Penguatan Pengawasan Internal dan Kualitas Reformasi Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Efisien di Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	82,70 Poin	82,45 Poin	99,69%

Dalam konteks target dalam Renstra lima tahunan, target akhir yang ditetapkan untuk Nilai SAKIP adalah 82.70 poin, sementara realisasi capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 82.45 poin, atau sebesar 99.69%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2025 hampir mencapai target untuk lima tahunan sehingga dapat dipertahankan sekaligus ditingkatkan performa dalam pencapaian target Indikator Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Tabel 5. Analisis Capaian terhadap Target Tahun-Tahun Sebelumnya Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Penguatan Pengawasan Internal dan Kualitas Reformasi Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Efisien di Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	80,02 Poin	79,12 Poin	79,88 Poin	82,31 Poin	82,45 Poin



Gambar 12. Tren Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE 2021-2025

Capaian kinerja Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2021–2025) menunjukkan tren perkembangan yang sangat positif dan progresif, walaupun pada tahun 2022 menurun dari tahun sebelumnya 2021 tetapi kembali tren perbaikan terhadap penilaian komponen penilaian SAKIP. Hal ini terlihat dari peningkatan Nilai SAKIP yang signifikan, di mana pada

tahun 2022 realisasi tercatat sebesar 79,12 poin dan meningkat menjadi 79,88 poin pada tahun 2023. Lonjakan performa yang mencolok terjadi pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 88,42 poin, yang merefleksikan keberhasilan berbagai inovasi dalam penguatan akuntabilitas dan tata kelola organisasi.

Meskipun pada tahun 2025 capaian kinerja Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar 82,45 poin, angka ini tetap menunjukkan konsistensi kinerja yang melampaui target perjanjian kinerja sebesar 82,31 poin dengan persentase capaian mencapai 100,17%. Secara keseluruhan, analisis tren ini membuktikan adanya peningkatan dalam perbaikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Ditjen KSDAE dan komitmen yang kuat dalam melakukan perubahan yang dalam pencapaian indikator. Keberhasilan mempertahankan nilai di atas standar target selama periode tersebut menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal KSDAE telah berhasil membangun pondasi akuntabilitas yang baik untuk mendukung efisiensi kerja dan transparansi pelaporan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Tabel 6. Benchmarking Kinerja Nilai SAKIP lingkup Kementerian Kehutanan

No	Indikator Kinerja	Unit Kerja	Realisasi 2025
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Inspektorat Jenderal	83,92
2		Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	82,45
3		Sekretariat Jenderal	82,23
4		Ditjen Planologi Kehutanan	82,20
5		BP2SDM	80,36
6		Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	80,26
7		Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	80,14
8		Ditjen Perhutanan Sosial	79,94
9		Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan	79,18

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) pada benchmarking kinerja lingkup Kementerian Kehutanan tahun 2025, mencapai capaian kinerja 82,45 poin berada dalam posisi kedua tertinggi setelah Inspektorat Jenderal 83,92 poin. Nilai ini capaian selaras dengan target Renstra Ditjen KSDAE 2025-2029 yang menetapkan Nilai SAKIP Ditjen KSDAE sebesar 82,70 poin. Sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai instrumen pengukuran akuntabilitas sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014, mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja, sehingga skor 82,45 poin ini mencerminkan Ditjen KSDAE dalam pelaksanaannya.

Tabel 7. Analisis Efisiensi Anggaran Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Indikator	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi
Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	82,31 Poin	82,45 Poin	100,17 %	75.332.229.000	74.927.833.212	99,46 %	0,9

Keterangan: < 1=efisien, >1 = tidak efisien

Direktorat Jenderal KSDAE menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian Nilai SAKIP sebesar 82,45 poin, berhasil melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 82,31 poin, atau sebesar 100,17%. Dari sisi anggaran, realisasi anggaran sebesar Rp. 74.927.833.212,- dari total pagu Rp. 75.332.229.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran mencapai 99,46%, dengan anggaran yang dialokasikan telah digunakan untuk mendukung program kerja yang telah direncanakan.

Nilai efisiensi sebesar 0,9, sesuai dengan kriteria efisien jika < 1 dan tidak efisien jika > 1, maka penggunaan anggaran pada Direktorat Jenderal KSDAE dikategorikan Efisien. Efisiensi ini bermakna bahwa instansi mampu menghasilkan output kinerja yang melampaui target (di atas 100%) namun dengan pemanfaatan biaya yang tidak melebihi pagu anggaran yang telah dianggarkan.

2. Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal KSDAE

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Setditjen KSDAE) Kementerian Kehutanan secara berkelanjutan melakukan penguatan sistem pengendalian dan manajemen organisasi. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kerangka penilaian yang ditetapkan oleh pemerintah. Tingkat maturitas SPIP merupakan tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Penilaian maturitas menjadi instrumen penting untuk mengukur tingkat kematangan proses, sistem, dan praktik tata kelola yang diterapkan, sekaligus sebagai dasar dalam perumusan langkah peningkatan poin maturitas. Dalam mengukur dan meningkatkan penyelenggaraan SPIP, Setditjen KSDAE melaksanakan kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2025. Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP ini terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu Persiapan, Pelaksanaan, dan Pelaporan.

Setelah seluruh tahapan tersebut dilaksanakan, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE melakukan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025 melalui aplikasi <https://simawas.itjen.kehutan.go.id> dan setelah itu akan dilaksanakan Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan.

Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal KSDAE berhasil mencapai Nilai Maturitas SPIP sebesar 3,9 Poin. Capaian ini menunjukkan performa yang melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebesar 3,8 Poin, dengan persentase pencapaian sebesar 102,63%. Pencapaian Nilai Maturitas SPIP yang tinggi ini memberikan keyakinan bahwa tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE semakin profesional, berintegritas, dan akuntabel dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.



Gambar 13. Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Ditjen KSDAE oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan

Tabel 8. Analisis Capaian terhadap Target Tahunan Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal KSDAE

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	%
Meningkatnya Penguatan Pengawasan Internal dan Kualitas Reformasi Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Efisien di Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	3,8 Poin	3,9 Poin	102,63%

Capaian kinerja Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP berdasarkan hasil penjaminan kualitas sebesar 3,9 poin menandakan bahwa sistem pengendalian internal di lingkungan Ditjen KSDAE telah berjalan dengan sangat baik dan telah melebihi target tahun 2025 sebesar 3,8 poin atau 102,63 %. Nilai maturitas SPIP berada pada Level 3, pencapaian 3,9 poin di tahun 2025 mencerminkan adanya peningkatan kualitas pengawasan internal lingkup Ditjen KSDAE.

Tingkat maturitas terdefinisi dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa Ditjen KSDAE telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik, menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, telah memiliki pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang baik, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian yang mampu memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko korupsi telah berdampak pada terciptanya budaya organisasi

antikorupsi. Ditjen KSDAE dengan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP terdefinisi telah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, telah memiliki pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang baik, telah memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tabel 9. Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal KSDAE

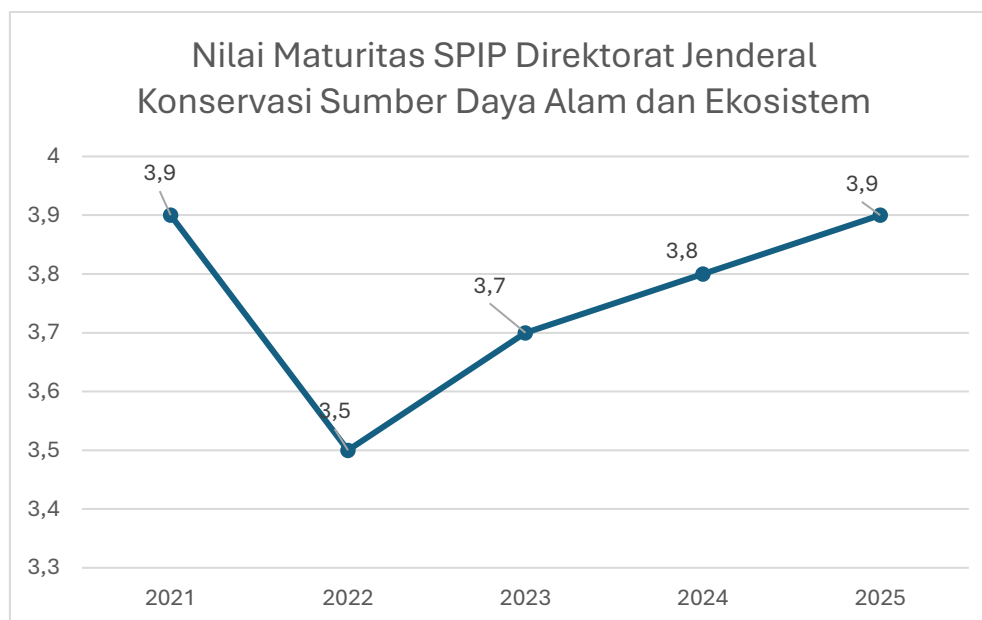
Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
Meningkatnya Penguatan Pengawasan Internal dan Kualitas Reformasi Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Efisien di Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	3,85 Poin	3,9 Poin	101,29 %

Keberhasilan capaian kinerja dalam mencapai target ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian intern di lingkungan Ditjen KSDAE telah berjalan dengan efektif dan melebihi dari target yang direncanakan dalam lima tahun kedepan. Nilai sebesar 3,9 poin mencerminkan komitmen kuat organisasi dalam mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien. Capaian di atas 100% ini juga menandakan bahwa langkah-langkah dalam mitigasi risiko, kualitas audit internal, dan tata kelola organisasi telah terintegrasi dengan baik ke dalam budaya kerja, sehingga mampu mendukung perlindungan sumber daya alam dan ekosistem secara lebih profesional dan transparan.

Tabel 10. Analisis Capaian terhadap Target Tahun-Tahun Sebelumnya Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal KSDAE

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Penguatan Pengawasan Internal dan Kualitas Reformasi Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Efisien di Lingkup Direktorat Jenderal	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	3,9 Poin/ Level 3	3,5 Poin/ Level 3	3,7 Poin/ Level 3	3,8 Poin/ Level 3	3,9 Poin/ Level 3

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem						



Gambar 14. Tren Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal KSDAE 2021-2025

Tabel 11. Benchmarking Kinerja Nilai SPIP lingkup Kementerian Kehutanan

No	Indikator Kinerja	Unit Kerja	Realisasi 2025
1	Nilai SPIP	Sekretariat Jenderal	4,2
2		BP2SDM	4,2
3		Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan	4,2
4		Ditjen Perhutanan Sosial	4,1
5		Inspektorat Jenderal	4
6		Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	3,9
7		Ditjen Planologi Kehutanan	3,9
8		Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	3,9
9		Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	3,8

Tabel 12. Analisis Efisiensi Anggaran Nilai SPIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Indikator	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi
Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	3,8 Poin	3,9 Poin	102,63 %	463.400.000	463.114.500	99,94 %	0,9

Keterangan: < 1=efisien, >1 = tidak efisien

Direktorat Jenderal KSDAE menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian Nilai SPIP sebesar 3,9 poin, berhasil melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 3,8 poin, atau sebesar 102,63%. Dari sisi anggaran, realisasi anggaran sebesar Rp. 463.114.500,- dari total pagu Rp. 463.400.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran mencapai 99,94%, dengan anggaran yang dialokasikan telah digunakan untuk mendukung program kerja yang telah direncanakan.

Nilai efisiensi sebesar 0,9, sesuai dengan kriteria efisien jika < 1 dan tidak efisien jika > 1, maka penggunaan anggaran pada Direktorat Jenderal KSDAE dikategorikan Efisien. Efisiensi ini bermakna bahwa instansi mampu menghasilkan output kinerja yang melampaui target (di atas 100%) namun dengan pemanfaatan biaya yang tidak melebihi pagu anggaran yang telah dianggarkan.

Selain pembahasan indikator kinerja kegiatan pada perjanjian kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2025, terdapat beberapa indikator kinerja penunjang lainnya dalam perjanjian kinerja yaitu sebagai berikut:

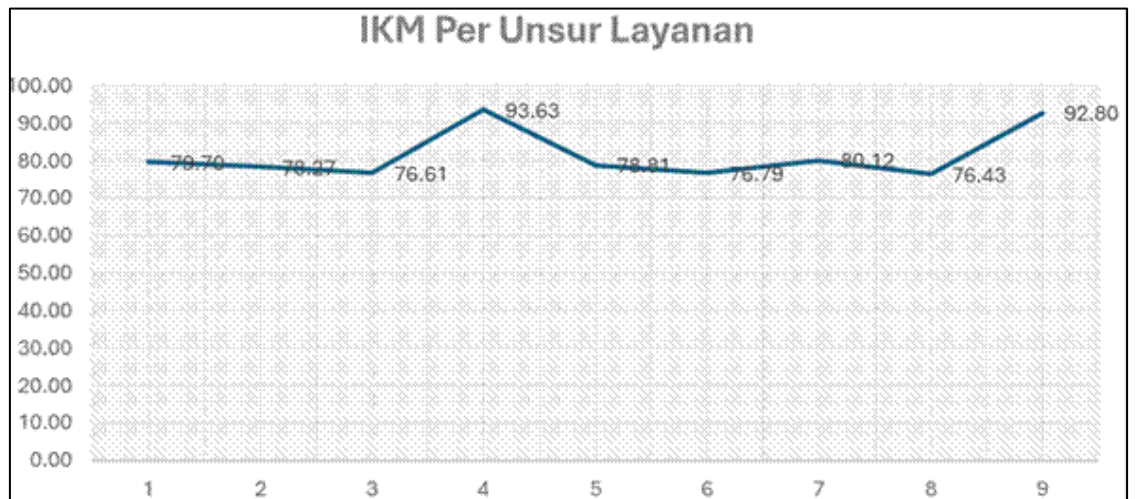
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Setditjen KSDAE tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
Nilai Survey Kepuasan Layanan	79 Poin	80 Poin	101,26 %
Nilai Maturitas SPIP Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	3,9 Poin	4 Poin	102,56 %
Nilai SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	89 Poin	89,43	100,48 %
Indeks Profesionalitas ASN Ditjen KSDAE	83 Poin	78,51 Poin	94,59 %
Laporan keuangan yang akuntabel	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

3. Nilai Survey Kepuasan Layanan

Pada tahun 2025, pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 81,38 dari target 79 poin. Nilai SKM menunjukkan adanya peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari pelayanan - pelayanan tahun sebelumnya.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan kuesioner *online* yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil SKM pada kesembilan unsur dalam kuesioner SKM Sekretariat Ditjen KSDAE yaitu:



Keterangan: 1) Persyaratan, 2) Prosedur, 3) Waktu, 4) Biaya, 5) Produk, 6) Kompetensi, 7) Perilaku 8) Sarpras, 9) Pengaduan

Gambar 15. IKM per Unsur Layanan

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan analisis terhadap responden SKM Sekretariat Ditjen KSDAE yang berasal dari ASN Balai Besar KSDA/TN, Balai KSDA/TN dan Direktorat Lingkup Ditjen KSDAE, terdapat sebanyak 420 orang responden pada tahun 2025.

Unsur pelayanan terbaik pada Sekretariat Direktorat KSDAE adalah unsur kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan (dengan IKM 93,63). Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya seluruh pelayanan pada Setditjen KSDAE adalah gratis. Sedangkan unsur pelayanan terbaik kedua yaitu unsur penanganan pengaduan pengguna layanan dengan nilai IKM 92,80.

Unsur pelayanan yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanan perbaikan berdasarkan hasil SKM adalah unsur kualitas sarana dan prasarana dengan nilai IKM 76,43 serta unsur kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan dengan nilai IKM terendah kedua (76.61).

Kami perlu terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada seluruh pengguna layanan baik seluruh ASN lingkup Ditjen KSDAE maupun pengguna layanan lainnya, untuk mewujudkan implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan kebijakan konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia.

4. Nilai Maturitas SPIP Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Berdasarkan Laporan hasil atas Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan SPIP Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Tahun 2025. Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu sebesar 4,057 atau berada dalam level terkelola atau level 4 (empat) dari 5 (lima) tingkat maturitas Penyelenggaraan SPIP. Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap fokus penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Tabel 14. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Setditjen KSDAE 2025

No	Fokus Penilaian	Hasil Re-Evaluasi Maturitas SPIP Tahun 2024	Hasil Penilaian Mandiri (PM) Maturitas SPIP Tahun 2025	Hasil Penjaminan Kualitas (PK) atas PM SPIP Tahun 2025
1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,889	4,156	4,057
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	4,196	4,468	4,265
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,88	3,964	3,76

No	Tahun	Unit Audit	Anggota	Ketua	Dainis	Posisi	Status	Penilaian	Hasil PM			Hasil PK			Aksi
									SPIP	MRI	IEPK	SPIP	MRI	IEPK	
1	2025	Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Rangga Mahardika, S.Hut.	Eru Feriana, S.Hut.	Ficky Rahmat Agustian, S.Hut.	SATKER	SELESAI	920/920	4.156	4.468	3.964	4.0573	4.2656	3.76	Q CHP

Gambar 16. Penilaian Maturitas Setditjen KSDAE 2025 pada Aplikasi Simawas

Tingkat maturitas terkelola dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE telah dilaksanakan secara terkelola dan terukur. Unsur-unsur SPIP yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern telah diterapkan dan terdokumentasi dengan baik. Perolehan nilai maturitas SPIP tahun 2025 sebesar 4,057. Terdapat kenaikan dari perolehan nilai maturitas tahun 2024 sebesar 3,889. Nilai Penyelenggaraan Maturitas SPIP dihasilkan oleh beberapa faktor pendukung capaian, antara lain:

- a. Penguatan komitmen pimpinan dalam penerapan tata kelola dan manajemen kinerja;
- b. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan internal, SOP, serta pedoman kerja;
- c. Peningkatan kualitas perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja;
- d. Koordinasi yang lebih efektif antarbagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE;
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses administrasi dan pelaporan.

Dalam proses penyelenggaraan SPIP beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang hasil penilaian maturitas yaitu:

- a. Sosialisasi dan internalisasi kebijakan terkait maturitas;
- b. Melibatkan seluruh stakeholder (tim kerja) dalam penyusunan rencana pengendalian internal;
- c. Penyusunan dan penyempurnaan SOP;
- d. Penguatan peran unit pengendalian intern;
- e. Koordinasi dan pendampingan dengan Inspektorat Jenderal selaku Penjamin Kualitas (PK).

Meskipun target dapat dicapai, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi capaian nilai maturitas Tahun 2025 antara lain:

- a. Belum optimalnya pemahaman seluruh pegawai terhadap konsep maturitas dan pengendalian intern serta implementasi maturitas;
- b. Belum optimalnya keterlibatan *stakeholder* (tim kerja) yang ada di Setditjen KSDAE;
- c. Keterbatasan dokumentasi pendukung pada beberapa proses bisnis;

- d. Konsistensi penerapan atau implementasi SOP serta pengendalian dan pengawasan internal yang masih perlu ditingkatkan;
- e. Perubahan kebijakan dan dinamika organisasi

Berdasarkan hasil analisis capaian level maturitas tahun 2025, beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian dan perbaikan kedepannya yaitu:

- a. Meningkatkan internalisasi dan pemahaman pegawai terkait konsep maturitas;
- b. Memperkuat komitmen pimpinan dan pengawasan berjenjang;
- c. Meningkatkan kualitas manajemen risiko terintegrasi;
- d. Melengkapi dan menstandarkan dokumentasi proses;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.



Gambar 17. evaluasi atas Penilaian Maturitas SPIP Setditjen KSDAE 2025

5. Nilai SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan instansi pemerintah. Pelaksanaan SAKIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam perencanaan target 2025 indikator kinerja Nilai SAKIP Setditjen KSDAE Tahun 2025 sebesar 89 poin merupakan target yang tertera dalam perjanjian kinerja Sekditjen KSDAE tahun 2025.

Evaluasi SAKIP tahun 2025 dilakukan berdasarkan Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 975 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penilaian SAKIP dilakukan terhadap 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Pengukuran nilai SAKIP dilakukan berdasarkan Penilaian Mandiri SAKIP pada Aplikasi E-SAKIP KLHK dan Penjaminan Kualitas oleh Eselon I.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan No: ND.2784/SETJEN/ROCAN/REN.02.02/B/12/2025 tanggal 16 Desember 2025, perihal Hasil Penilaian Mandiri AKIP lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2025, nilai SAKIP Setditjen KSDAE tahun 2026 yaitu sebesar 89,43 poin atau 100,48% dengan nilai A (Memuaskan).

Tabel 15. Hasil penilaian E-SAKIP Setditjen KSDAE 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,21
2.	Pengukuran Kinerja	30	26,69
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,66
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			89,43
Kategori AKIP			A (Memuaskan)

Peningkatan capaian indikator kinerja nilai SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Ditjen KSDAE dalam melaksanakan reformasi birokrasi.
2. Implementasi berbagai kebijakan dan program reformasi birokrasi yang efektif dan efisien.
3. Target yang ditetapkan tahun 2024 merupakan baseline nilai SAKIP Setditjen KSDAE hasil penjaminan kualitas pada tahun 2023 melalui aplikasi E-SAKIP KLHK.

6. Indeks Profesionalitas ASN

Capaian Indeks Profesionalitas (IP) ASN di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025 tercatat sebesar 79,83 poin, yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tetap terjaga

pada standar yang memadai. Angka ini merupakan cerminan dari dedikasi seluruh aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan integritas yang tinggi. Realisasi ini menjadi modalitas penting bagi organisasi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas di sektor konservasi.

Dalam konteks pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 83 poin, hasil saat ini dipandang sebagai sebuah proses pembelajaran organisasi yang sedang berakselerasi. Selisih yang ada menunjukkan adanya ruang improvisasi yang positif, terutama dalam menyelaraskan antara kinerja riil di lapangan dengan pencatatan administratif di sistem kepegawaian. Organisasi memandang dinamika ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat sistem pendukung keputusan berbasis data SDM yang lebih akurat.

Salah satu fokus utama yang sedang ditingkatkan adalah optimalisasi dimensi kompetensi melalui pemutakhiran data mandiri oleh setiap pegawai. Direktorat Jenderal KSDAE terus memotivasi para pegawai untuk mendokumentasikan setiap upaya pengembangan kapasitas, seperti partisipasi dalam diklat, *workshop*, maupun bimbingan teknis, agar terekam secara sistematis dalam *database* nasional. Hal ini bertujuan agar setiap kompetensi yang telah diasah dapat diakui secara formal dan memberikan kontribusi nyata bagi nilai indeks organisasi.

Langkah-langkah strategis juga telah disiapkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal untuk memberikan pendampingan teknis yang lebih intensif kepada seluruh unit kerja. Melalui sosialisasi yang berkelanjutan dan penyediaan kanal konsultasi mengenai sistem informasi kepegawaian, diharapkan hambatan administratif dapat diminimalisir secara bertahap. Semangat kolaborasi ini diharapkan mampu membangun budaya kerja yang tertib administrasi tanpa mengurangi fokus pada produktivitas utama di lapangan.

Secara keseluruhan, capaian IP ASN tahun 2025 tetap dipandang sebagai keberhasilan dalam mempertahankan standar profesionalisme yang kompetitif di lingkungan kementerian. Dengan komitmen yang kuat untuk terus bertumbuh, Direktorat Jenderal KSDAE optimis bahwa kualitas sumber daya manusia akan terus meningkat seiring dengan penyempurnaan sistem manajemen talenta. Hal ini menjadi kunci utama dalam memastikan organisasi

tetap adaptif dan andal dalam menghadapi tantangan pengelolaan konservasi sumber daya alam di masa depan.

Tabel 16. Nilai Indeks Profesionalitas ASN lingkup Kementerian Kehutanan 2025

No	Indikator Kinerja	Unit Kerja	Capaian 2025
1	Indeks Profesionalitas ASN	Inspektorat Jenderal	85,38
2		Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	85,37
3		BP2SDM	84,43
4		Ditjen Planologi Kehutanan	83,85
5		Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	82,06
6		Ditjen Perhutanan Sosial	81,58
7		Sekretariat Jenderal	81,22
8		Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	78,51
9		Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan	76,47

7. Laporan Keuangan yang Akuntabel

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Kehutanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bentuk pertanggungjawaban dimaksud yaitu dengan menyusun laporan keuangan yang terdiri Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA) dibawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) satuan kerja yang terdiri dari Kantor Pusat, Balai Besar/Balai KSDA dan Taman Nasional.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel.

Pada tahun 2025 telah disusun Laporan Keuangan Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (Unaudited dan Audited) serta Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025. Laporan keuangan disusun dengan berpedoman Kualitas Laporan Keuangan yang baik adalah yang dapat menyampaikan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara.

B. Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran

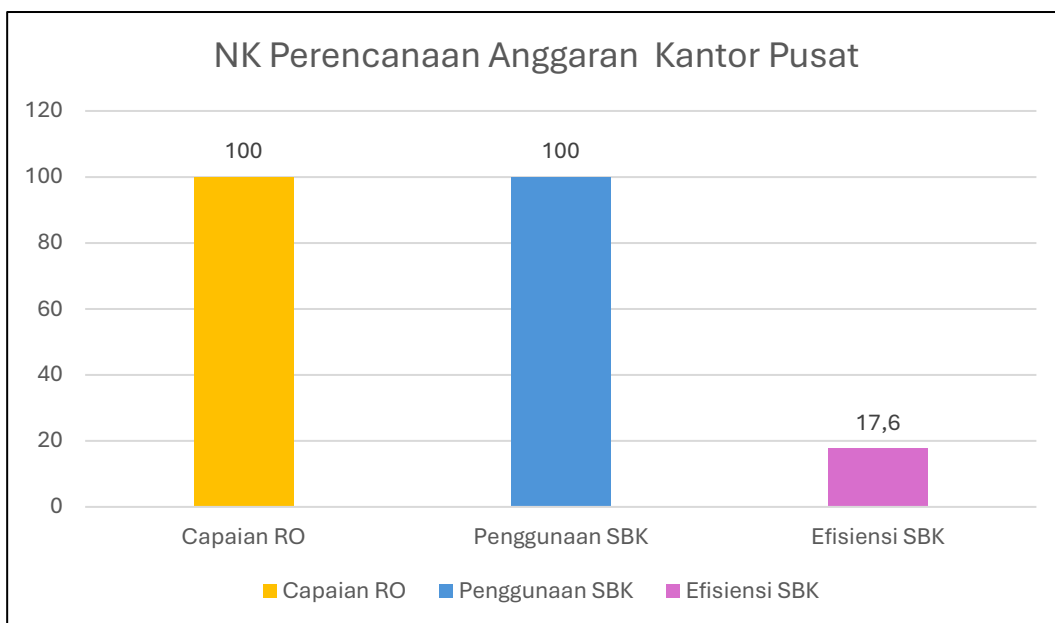
Pagu anggaran awal Sekretariat Ditjen KSDAE sebesar RP. 62.594.940.000,-, terdapat 20 kali revisi anggaran (7 revisi POK, 5 Kantor Wilayah dan 8 di DJA), sehingga pada akhir tahun 2025 pagu anggaran Sekretariat Ditjen KSDAE adalah sebesar Rp. 75.795.629.000,-. Berdasarkan jenis belanja, proporsi anggaran tertinggi ke yang terendah berturut-turut yaitu belanja pegawai untuk seluruh pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 60,66%, operasional sebesar 42,57 % dan belanja barang non operasional sebesar 23,94 %.

Dengan berbagai upaya percepatan pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi anggaran, realisasi anggaran Sekretariat Ditjen KSDAE sebesar Rp. 75.390.947.712,- atau 99,47%. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 82.039.610.272,-, atau 96,76% dari pagu anggaran Rp. 84.784.531.000,-, realisasi anggaran tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,71%. Nilai kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE berada pada angka 101,53% yang diperoleh dari 2 capaian indikator kinerja kegiatan yaitu nilai SAKIP sebesar 100,17% dan nilai maturitas SPIP sebesar 102,89%. Apabila angka capaian kinerja disandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 0,97 maka diperoleh nilai rasio efisiensi kurang dari 1. Angka ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal dalam mendukung tata kelola Direktorat Jenderal KSDAE dipandang efektif dan efisien.

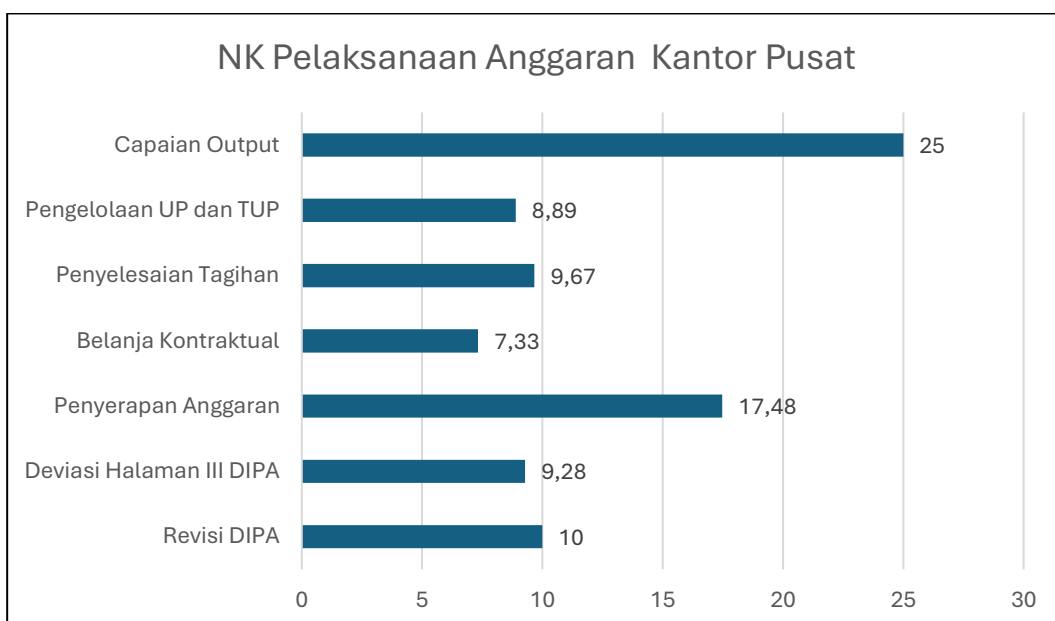
Nilai kinerja anggaran merupakan representasi dari kualitas perencanaan penganggaran dan perbendaharaan dalam pelaksanaan APBN. Nilai ini menjadi dasar pemberian *reward & punishment* oleh Kementerian Keuangan. Karena Setditjen KSDAE



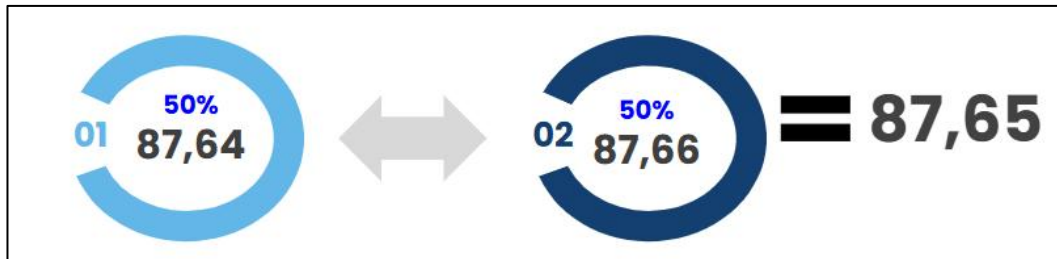
Gambar 18. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran



Gambar 19. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Kantor Pusat Ditjen KSDAE



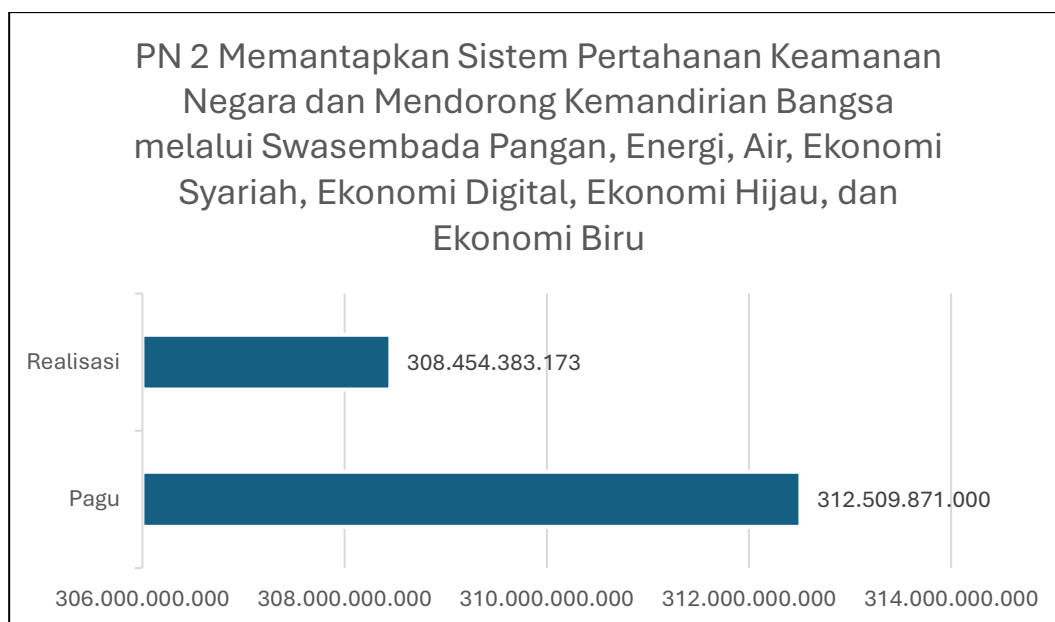
Gambar 20. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Pusat Ditjen KSDAE



Gambar 21. Nilai Kinerja Anggaran Kantor Pusat Ditjen KSDAE 2025

C. Dukungan terhadap Prioritas Nasional

Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2025 mendukung 1 Program Prioritas Nasional, yaitu Prioritas Nasional 2 (Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru). Dalam Pelaksanaannya Ditjen KSDAE dibantu oleh UKE II lingkup Ditjen KSDAE dalam pencapaian kegiatan tahun 2025. Dalam pelaksanaannya pada UKE II Ditjen KSDAE, PN 2 terbagi dalam 26 rincian output dengan dukungan pagu anggaran sebesar Rp. 312.509.871.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 308.454.383.173,- atau 98,70%.



Gambar 22. Capaian PN 2 Ditjen KSDAE 2025

D. Capaian Program Tematik

Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal KSDAE mendapatkan mandat untuk turut berperan dalam mensukseskan kegiatan aksi tematik Kementerian Kehutanan yaitu Program Prioritas Nasional, Kegiatan

Pengelolaan Perbatasan, Kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kegiatan FOLU NC 2 & 3 IP Ditjen KSDAE.

Kegiatan Pelaksanaan Program Prioritas nasional

- Dasar Pemantauan : Rencana strategis Kementerian Kehutanan 2025-2029
- Ukuran Keberhasilan : Tercapainya Program Nasional 2025
- Capaian : Tercapainya realisasi anggaran dan kinerja Ditjen KSDAE pada PN 2.

Kegiatan Pengelolaan Perbatasan

- Dasar Pemantauan : Pasal 15 UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah negara dan Pasal 3 Perpres No. 12 Tahun 2010, Perpres 44 Tahun 2017 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- Ukuran Keberhasilan : Mendukung rencana pemerintah dalam rangka efektifitas Pengelolaan Perbatasan Negara sebagai halaman depan Negara yang berdaulat, berdaya saing dan aman.
- Capaian : tercapainya kegiatan perbatasan baik bantuan masyarakat, pembangunan dan patroli.

Kegiatan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

- Dasar Pemantauan : Berdasarkan Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Dalam Penetapan Daerah Tertinggal secara Nasional
- Ukuran Keberhasilan : Pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal lingkup Ditjen KSDAE
- Capaian : Tercapainya capaian kinerja pada 15 satker Ditjen KSDAE yang mendukung Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Kegiatan FOLU NC 2 & 3 IP Ditjen KSDAE

Dalam kurun waktu efektif 5 bulan (Agustus s.d Desember), berikut capaian kinerja fisik dan keuangan Proyek FOLU NC 2 & 3 IP Ditjen KSDAE Tahun 2025:

1. Realisasi dana sejumlah Rp 33.974.200.417,- (80,30%) dari total dana yang diterima sejumlah Rp 42.308.208.779,-
2. Kinerja output C.1. Konservasi ekosistem dan peningkatan populasi spesies dicapai melalui kegiatan utama C.1.1 Aksi pencegahan deforestasi dan degradasi di tanah mineral dan gambut. Target : 60.000 hektar, capaian : 265.156 hektar (442%). Rincian capaian per

kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas SDM SMART Patrol di 2 UPT yaitu BBTN Gunung Gede Pangrango dan BTN Tanjung Puting serta penyiapan wilayah kerja resort di 7 UPT dari target 18 UPT (38,9%).
 - b. Operasionalisasi SMART Patrol seluas 265.156 Ha (441,9%) dari target 60.000 Ha di 18 UPT.
 - c. Terbangunnya 1 unit pos jaga di BTN Tesso Nilo dari target 5 unit.
 - d. Pengadaan sarana pencegahan KARHUTLA sejumlah 1 paket (33,3%) di BBTN Bromo Tengger Semeru dari target 3 paket di 3 UPT.
 - e. Pembentukan dan pendampingan 52 kelompok masyarakat (288,9%) dari target 18 kelompok masyarakat di 18 UPT.
 - f. Penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi (METT) di 2 UPT (40%) dari target 5 UPT
3. Kinerja output C.2. Perlindungan Hutan/Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi dan Restorasi Habitat yang Terfragmentasi dicapai melalui kegiatan utama C.2.2 Aksi Peningkatan Cadangan Karbon Non- Rotasi. Target : 2.220 hektar, capaian : 515,5 hektar (23%). Rincian capaian per kegiatan sebagai berikut :
- a. Persiapan pembangunan sekat kanal dalam rangka mendukung upaya pemulihan ekosistem di TN Sebangau.
 - b. Pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB seluas 515,5 Ha (24,5%) dari target 2.101 Ha di 8 UPT.
 - c. Penyediaan peralatan pendukung lapangan Pemulihan Ekosistem sejumlah 1 Paket (100%) dari target 1 Paket

Kinerja output C.2 yang dicapai melalui kegiatan utama lainnya yaitu C.2.5 Aksi Konservasi Keanekaragaman Hayati Tinggi pada Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT/HCV). Target : 500.000 hektar, capaian : 0 hektar (0%). Rincian capaian per kegiatan sebagai berikut:

- a. Persiapan pelaksanaan identifikasi potensi daerah penyangga Taman Nasional dan ABKT sebagai Areal Preservasi.
- b. Terlaksananya kegiatan persiapan verifikasi potensi Areal Preservasi (33,3%) dari target 3 kegiatan.
- c. Sosialisasi dengan para pihak terkait intervensi manajemen pengelolaan ekosistem/ lanskap Batang Toru (Sumatera Utara).

- d. Terlaksananya pembangunan Sanctuary Badak Kalimantan di Suaka Badak Kelian sejumlah 1 unit, adapun translokasi badak sejumlah 1 ekor s.d masih dalam proses.
 - e. Terlaksananya translokasi Badak Jawa ke JRSCA sejumlah 1 ekor (50%) dari target 2 ekor.
4. Kinerja output C.3. Pengelolaan Jasa Ekosistem dan Taman Hutan Raya dicapai melalui kegiatan utama C.3.1 Intensifikasi jasa lingkungan dan wisata alam. Target : 41.405,49 hektar, capaian : 18.945,33 hektar (46%). Rincian capaian per kegiatan sebagai berikut:
- a. Tersusunnya peta indikatif tipe ekosistem di luar kawasan konservasi pada 7 region dan FGD Penyusunan Peta Indikatif Tipe ekosistem Alami pada Region Sulawesi, Maluku dan Papua.
 - b. Lokakarya Penyusunan Rancangan Dokumen Penataan Ruang Kelola dan Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KSA, KPA dan TB.
 - c. Persiapan pengadaan excavator di BTN Way Kambas dalam rangka mendukung kegiatan peningkatan efektifitas pengelolaan habitat dan pengendalian konflik satwa liar.
 - d. Tersusunnya dokumen hasil kajian tentang konsep/skema-kema Kawasan Ekonomi Konservasi (KEK) yang tengah berproses harmonisasi.
 - e. Perencanaan pembangunan JLKT di BBTN Bromo Tengger Semeru dan koordinasi, sosialisasi, Bimtek E-Ticketing dan E-Reporting, promosi/edukasi lingkungan.
 - f. Audiensi Draft Kajian Pungutan PNPB pada Pemegang Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) dan pembahasan Draft Kajian Pungutan Denda Administratif Pembangunan Sarana Prasarana yang tidak sesuai dengan Dokumen Perencanaan.
 - g. Tersedianya PAPA TN Gunung Halimun Salak seluas 4.570 ha dan penentuan titik lokasi PLTMH di TNBG.
5. Kinerja output C.4. Keragaman Spesies dan Genetik dieksplorasi dan dikomersialkan untuk masyarakat dicapai melalui kegiatan utama C.4.1 Keragaman spesies dan genetik dieksplorasi dan direkomendasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Target : 2 spesies, capaian : 12 spesies (600%). Rincian kegiatan yang mendukung kegiatan utama tersebut yaitu Eksplorasi dan uji laboratorium dalam rangka pengembangan produk bioprospeksi di BTN Gunung Merapi. Target 20 hektar, capaian 20 hektar (100%).

- a. Kinerja output C.5. Dukungan Manajemen dan Operasional dicapai melalui kegiatan Terselenggaranya kegiatan pendukung operasional dan administratif. Target : 12 bulan, capaian : 7 bulan (58%)

Kinerja output C.5 dukungan manajemen dan operasional Proyek FOLU NC 2 & 3 dicapai melalui beberapa kegiatan yaitu :

1. Pengadaan jasa lainnya dalam rangka mendukung puncak peringatan HKAN
2. Dukungan operasional Tenaga Ahli dan Tenaga Sub Profesional
3. Dukungan operasional honorarium Tim Pengelola Proyek
4. Konsolidasi persiapan pelaksanaan kegiatan
5. Penyusunan NSPK
6. Penyusunan RKA K/L awal dan split RKA K/L
7. Bimbingan Teknis (keuangan, PBJ, safeguard, monitoring dan evaluasi)
8. Konsolidasi percepatan pelaksanaan kegiatan
9. Konsinyasi pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran
10. *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Proyek FOLU RBC 1
11. *Monitoring* pelaksanaan kegiatan di tingkat tapak
12. Penyusunan Revisi OWP dan AWP 2025
13. Penyusunan Usulan OWP dan AWP 2026
14. Rekonsiliasi (keuangan, kinerja, safeguard, dokumentasi publikasi dan data spasial).



Gambar 23. Koordinasi Bersama Tim Inspektorat Wilayah, PMU dan UKPBJ



Gambar 24. Bimbingan Teknis Mengundang Perwakilan Level 2



Gambar 25. Monitoring PE di TN Gunung Gede Pangrango

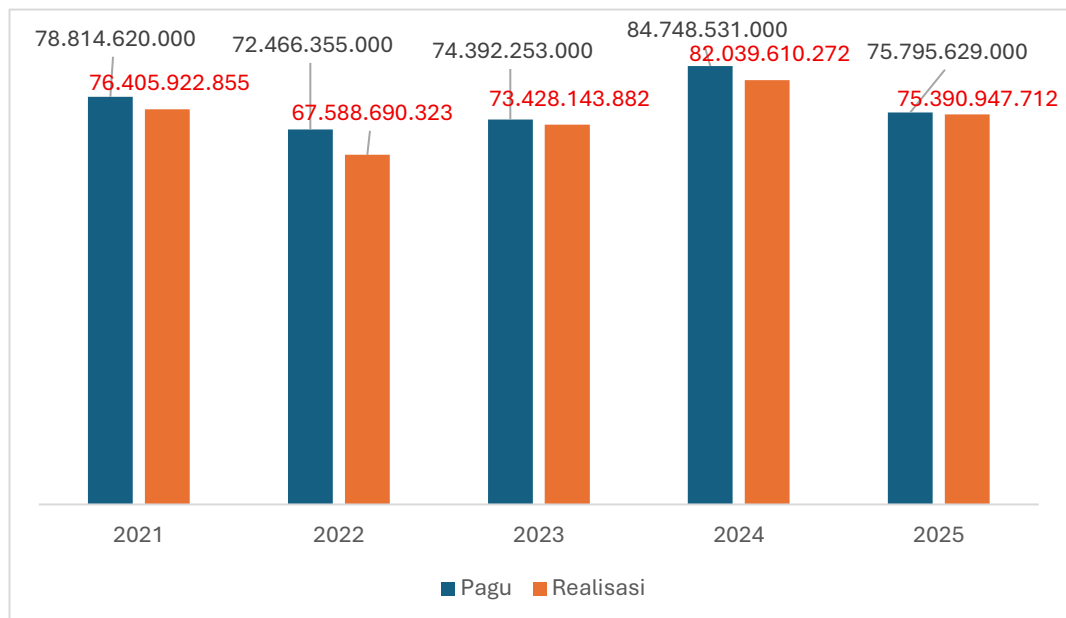


Gambar 26. Monitoring Bioprospeksi di TN Gunung Merapi

E. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2025 sebesar Rp. 75.795.629.000,-, dan realisasi sebesar Rp 75.390.947.712,- (99,47%) Dalam perjalanan anggaran tahun 2025, pagu anggaran Kantor Pusat mengalami 20 kali revisi anggaran (7 revisi POK, 5 Kantor Wilayah dan 8 di DJA).

Trend pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2021 sampai tahun 2025 menunjukkan dinamis dalam pagu dan realisasi anggaran. Dalam kurun waktu 5 tahun, anggaran terbesar yang pernah dikelola oleh Setditjen KSDAE terdapat pada tahun 2024 dengan pagu sebesar Rp. 84,78 Miliar. Sedangkan pagu paling kecil berada pada tahun 2022 sebesar Rp.72,48 Miliar.



Gambar 27. Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Setditjen KSDAE 2021-2025

Berdasarkan persentase realisasi anggaran, pada tahun 2025 realisasi anggaran mencatatkan rekor tertinggi yaitu sebesar 99,47% sedangkan persentase realisasi anggaran terkecil tercatat pada tahun 2023 sebesar 93,27%.



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan dukungan administrasi dan koordinasi di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Secara umum, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE telah berhasil melaksanakan program dukungan manajemen dengan efektif dan efisien.

Melalui kegiatan yang berupa dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal KSDAE, capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2025 sebesar 101,53% dan realisasi keuangan sebesar 99,47 %. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2025 dapat dikatakan berjalan efisien, hal ini dilihat dari nilai rasio kinerja fisik dengan kinerja keuangan sebesar 0,97.

Capaian indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja lainnya sebagai berikut:

Tabel 17. Target dan Capaian Indikator Kinerja Setditjen KSDAE 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	%
Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	3,8 Poin	3,91 Poin	102,89 %
Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	82,31 Poin	82,45 Poin	100,17 %
INDIKATOR KINERJA			
Nilai Survey Kepuasan Layanan	79 Poin	80 Poin	101,26 %
Nilai Maturitas SPIP Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	3,9 Poin	4 Poin	102,56 %
Nilai SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	89 Poin	89,43	100,48 %
Indeks Profesionalitas ASN Ditjen KSDAE	83 Poin	78,51 Poin	94,59 %
Laporan keuangan yang akuntabel	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

Pelaksanaan kedua indikator kinerja kegiatan tersebut dituangkan pada 3 output kegiatan yaitu layanan manajemen kinerja internal, layanan dukungan manajemen internal, dan layanan sarana dan prasarana Internal. Dengan tercapainya ketiga indikator kinerja kegiatan tersebut, kegiatan Dukungan Manajemen pada Sekretariat Ditjen KSDAE dapat dikatakan telah dapat mendukung terwujudnya sasaran reformasi tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Ditjen KSDAE.

B. Permasalahan & Langkah ke Depan

Tantangan yang mempengaruhi pelaksanaan Proyek FOLU NC 2&3 Ditjen KSDAE Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Struktur kelembagaan proyek FOLU NC 2&3 Ditjen KSDAE terdiri dari 1 level (terpusat di Setditjen KSDAE) dengan dana yang dikelola sejumlah 74 Milyar untuk pelaksanaan di 37 Unit Kerja. Kondisi ini tidak ideal dalam pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
2. Proses penetapan perubahan Tim Pengelola Proyek dari semula struktur kelembagaan 1 Level menjadi 2 Level membutuhkan waktu yang cukup lama
3. Percepatan realisasi dana tahap 1 sebagai dasar permohonan dana tahap 2
4. Belum adanya diskresi kebijakan permohonan dana lanjutan selain ketentuan minimal realisasi

Tindak lanjut penyelesaian tantangan pelaksanaan Proyek FOLU NC 2&3 Ditjen KSDAE Tahun 2025 :

1. Telah disampaikan usulan struktur kelembagaan proyek semula 1 Level menjadi 2 Level dengan Setditjen sebagai level 1 dan 30 unit kerja sebagai Level 2
2. Penerbitan keputusan *Project Director* dan KPA perihal penetapan Tim Pelaksana Proyek, PPK dan PPBJ tanggal 26 September 2025. Selanjutnya tanggal 29 September 2025 melalui keputusan Koordinator Kegiatan ditunjuk Personil Tim Pengelola Proyek FOLU NC 2 & 3 Ditjen KSDAE.
3. Setelah penetapan Tim Pengelola Proyek 2 Level, dilakukan Bimbingan Teknis dan selanjutnya dilakukan distribusi dana sebagian dari 22 M pada tanggal 23 Oktober 2025 kepada Level 2 guna percepatan realisasi
4. Terbitnya Keputusan Direktur Utama BPD LH salah satunya terkait dengan kebijakan Tambahan Dana Operasional yang memberikan pertimbangan permohonan dana dapat disampaikan meskipun belum realisasi minimal 80%.

Langkah kedepan persiapan pelaksanaan Proyek FOLU NC 2&3 Ditjen KSDAE Tahun 2026 :

1. Penguatan struktur kelembagaan 2 level
2. Peningkatan kapasitas SDM tim pengelola proyek 2 level
3. Pemanjapan NSPK pelaksanaan proyek
4. Pengendalian pelaksanaan proyek (perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan *monitoring* evaluasi dan pelaporan)
5. Penguatan database pelaksanaan proyek



@BBKSDA NTT

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Setditjen KSDAE 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Ammy Nurwati, M.M

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Agr.Sc.

Jabatan : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem



Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Agr.Sc.
NIP. 19710609 199512 1 001

Pihak Pertama,

Sekretaris Direktorat Jenderal
Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem



Dr. Ir. Ammy Nurwati, M.M
NIP. 19690821 199403 2 001

Stakeholder Perspective

No	Sasaran	Indikator	Target	
1	Meningkatnya penguatan pengawasan internal dan kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1.1	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	3,8 Poin
		1.2	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	82,31 Poin

Customer Perspective

No	Sasaran	Indikator	Target	
2	Meningkatnya kualitas layanan internal yang berorientasi kepuasan	2.1	Nilai Survey Kepuasan Layanan	79 poin

Internal Process

No	Sasaran	Indikator	Target	
3	Pengendalian dan Pengawasan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang Agile, Efektif dan Efisien	3.1	Nilai Maturitas SPIP Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	3,9 Poin
4	Peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	4.1	Nilai SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	89 Poin

Learning and Growth

No	Sasaran	Indikator	Target	
5	Penguatan organisasi dan Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	5.1	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen KSDAE	83 Poin
6	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang efektif, efisien dan akuntabel	6.1	Laporan keuangan yang akuntabel	1 Dokumen

Rencana Aksi perjanjian kinerja Setditjen KSDAE 2025

RENCANA AKSITAHUN 2025 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Stakeholder Perspective

No	Sasaran dan Indikator	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
1.	Meningkatnya penguatan pengawasan internal dan kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem					
1.1	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	25 %	50%	75%	100%	3,8 poin
1.2	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	25 %	50%	75%	100%	52,31 poin

Customer Perspective

No	Sasaran dan Indikator	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
2.	Meningkatnya kualitas layanan internal yang berorientasi kepuasan					
2.1	Nilai Survey Kepuasan Layanan	25 %	50%	75%	100%	79 poin

Internal Process

No	Sasaran dan Indikator	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
3.	Pengendalian dan Pengawasan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang Agile, Efektif dan Efisien					
3.1	Nilai Maturitas SPIP Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	25 %	50%	75%	100%	3,9 poin
4.	Peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem					
4.1	Nilai SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	25 %	50%	75%	100%	89 poin

Learning and Growth

No	Sasaran dan Indikator	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
5.	Penguatan organisasi dan Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem					
5.1	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan	25 %	50%	75%	100%	83 Poin
6.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang efektif, efisien dan akuntabel					
6.1	Laporan keuangan yang akuntabel	25 %	50%	75%	100%	1 Dokumen



KEMENTERIAN KEHUTANAN

**DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM**

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8
Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telp. +62 21 5730301 - 5730316
Fax +62 21 5733437